



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RKPD PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2019**



Ir. H. JOKO WIDODO
Presiden Republik Indonesia



TJAHJO KUMOLO, SH.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia



Drs. H. M. JUSUF KALLA
Wakil Presiden Republik Indonesia

NAWA CITA **2014 - 2019**

1. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA
2. MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA
3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN
4. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA
5. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA
6. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL
7. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGERAKAN SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK
8. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA
9. MEMPERTEGUH KE-BHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA



SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH DALAM RKP 2019





KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Tema RKP 2019: Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas

5 Prioritas Nasional RKP 2019 → Tahun Terakhir Pelaksanaan NAWACITA

**Tema Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019
“Pertumbuhan Ekonomi untuk Mengurangi Kemiskinan,
Pengangguran dan Kesenjangan”**

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019

1. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan penanggulangan kemiskinan;
2. Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur ekonomi untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan;
3. Peningkatan agro industri melalui nilai tambah pengembangan agro maritim serta akselerasi kepariwisataan;
4. Peningkatan ketahanan pangan dan energi serta tata kelola sumber daya air & pelestarian sumber daya alam lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban serta kesuksesan pelaksanaan pemilu

APBD 2019



Indikator Makro Pembangunan Nasional terhadap Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

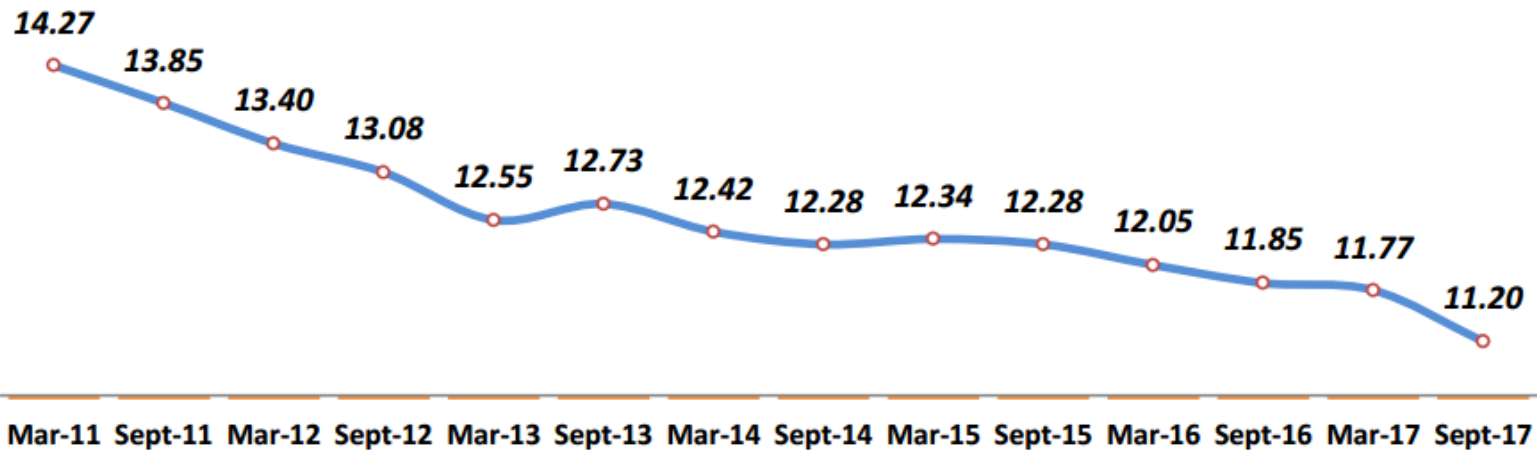
	Target daerah dalam RPJMN 2019	Target Nasional dalam RKP 2019	Capaian Daerah Tahun 2017	Target Daerah dalam RKPDP Prov. Jawa Timur (2019)
Tingkat Kemiskinan	9,6%	8,5-9,5%	11,2%	11,2 – 10,9%
IPM	-	71,98	69,74 *) ²⁰¹⁶	70,00 – 70,25
Gini Ratio	-	0,38-0,39	0,415	0,38 – 0,40
Pertumbuhan Ekonomi	6,2%	5,4-5,8%	5,45%	5,66 – 6,06%
Pengangguran	3,5%	4,8-5,2%	4%	3,99 – 3,90%
Inflasi	-	2,5-4,5%	4,04%	-

Target pencapaian indikator makro di Provinsi Jawa Timur dalam RKPDP Tahun 2019 lebih rendah dari pada target yang diproyeksikan dalam RPJMN 2015-2019, oleh karena itu perlu lebih ditingkatkan melalui pelaksanaan program-program pengurangan kemiskinan dan peningkatan ekonomi.



Gambaran Angka Kemiskinan Prov. Jawa Timur

Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur, 2011-2017



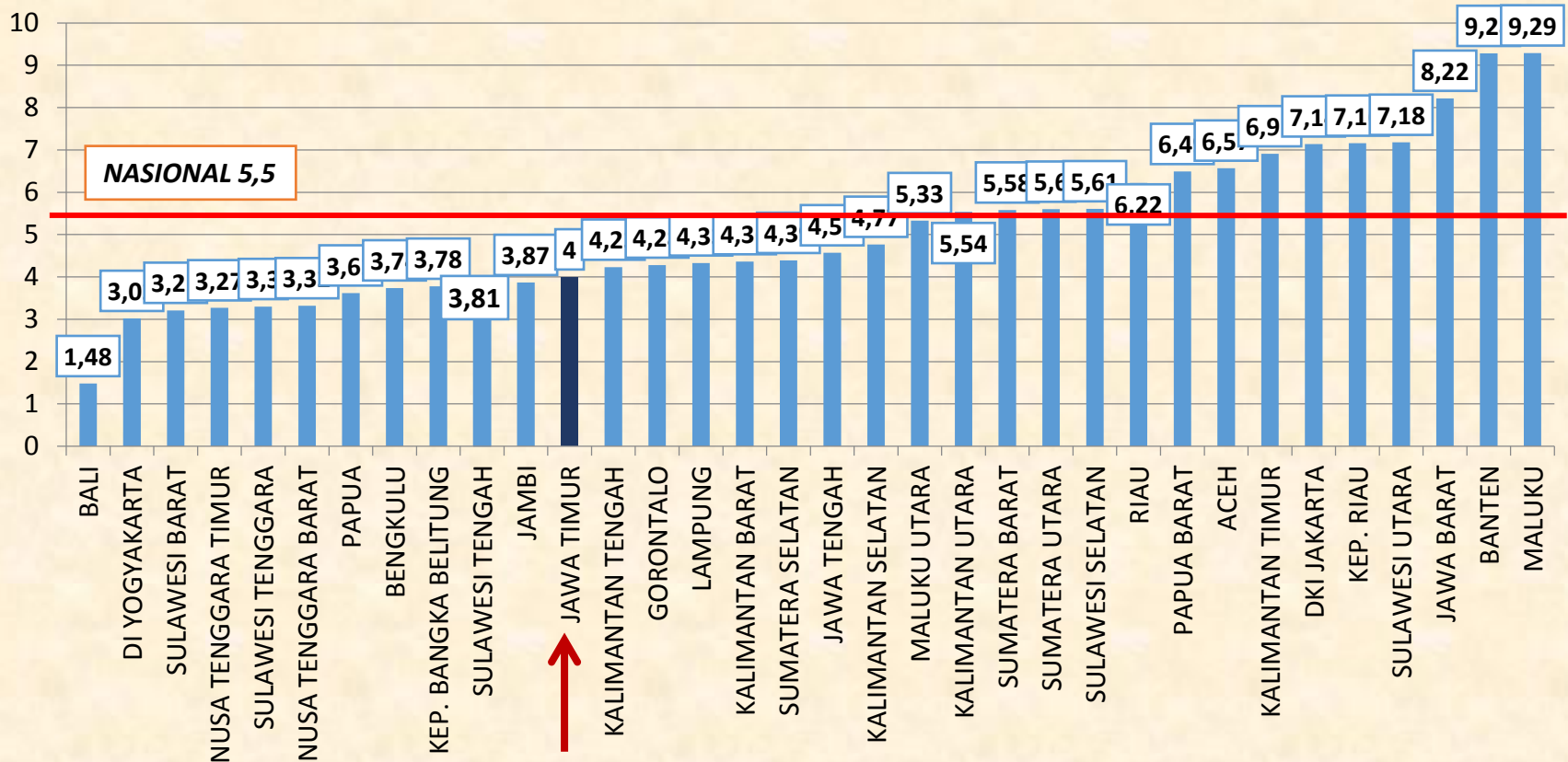
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Susenas 2011-2017

- Selama periode Maret - September 2017, persentase penduduk miskin Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 0,57 poin, yaitu dari 11,77% pada Maret 2017 menjadi 11,20% pada September 2017. Penurunan selama satu semester tersebut ditunjukkan dengan turunnya jumlah penduduk miskin sebesar 211,74 ribu jiwa yang semula berjumlah 4.617,01 ribu jiwa pada Maret 2017 menjadi 4.405,27 ribu jiwa pada September 2017.
- Pada periode Maret - September 2017, garis kemiskinan meningkat sebesar 5,32 persen atau naik Rp. 18.210 per kapita perbulan, yaitu dari Rp. 342.092 per kapita perbulan pada Maret 2017 menjadi Rp. 360.302 per kapita perbulan pada September 2017.

Sumber: BPS Jawa Timur, 2018



Tingkat Pengangguran Terbuka Prov. Jawa Timur Tahun 2017



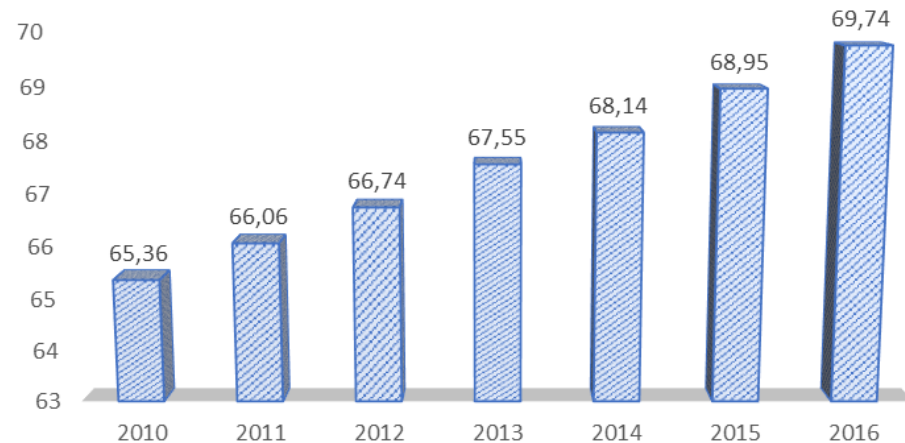
- *Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 (4%) berada di bawah rata-rata Nasional (5,5). Namun demikian, angka tersebut masih perlu diturunkan melalui program-program peningkatan ekonomi dan kesempatan berusaha, dan lainnya.*



Gambaran IPM Provinsi Jawa Timur

No.	Wilayah	IPM
1	DKI Jakarta	79,6
2	DI Yogyakarta	78,38
3	Kalimantan Timur	74,59
4	Kep. Riau	73,99
5	Bali	73,65
6	Riau	71,2
7	Sulawesi Utara	71,05
8	Banten	70,96
9	Sumatera Barat	70,73
Nasional		70,18
10	Jawa Barat	70,05
11	Aceh	70
12	Sumatera Utara	70
13	Jawa Tengah	69,98
14	Sulawesi Selatan	69,76
15	Jawa Timur	69,74
16	Jambi	69,62
17	Kep. Bangka Belitung	69,55
18	Bengkulu	69,33
19	Sulawesi Tenggara	69,31
20	Kalimantan Utara	69,2
21	Kalimantan Tengah	69,13
22	Kalimantan Selatan	69,05
23	Sumatera Selatan	68,24
24	Lampung	67,65
25	Maluku	67,6
26	Sulawesi Tengah	67,47
27	Maluku Utara	66,63
28	Gorontalo	66,29
29	Kalimantan Barat	65,88
30	Nusa Tenggara Barat	65,81
31	Sulawesi Barat	63,6
32	Nusa Tenggara Timur	63,13
33	Papua Barat	62,21
34	Papua	58,05

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
PROV. JAWA TIMUR TAHUN 2010-2016



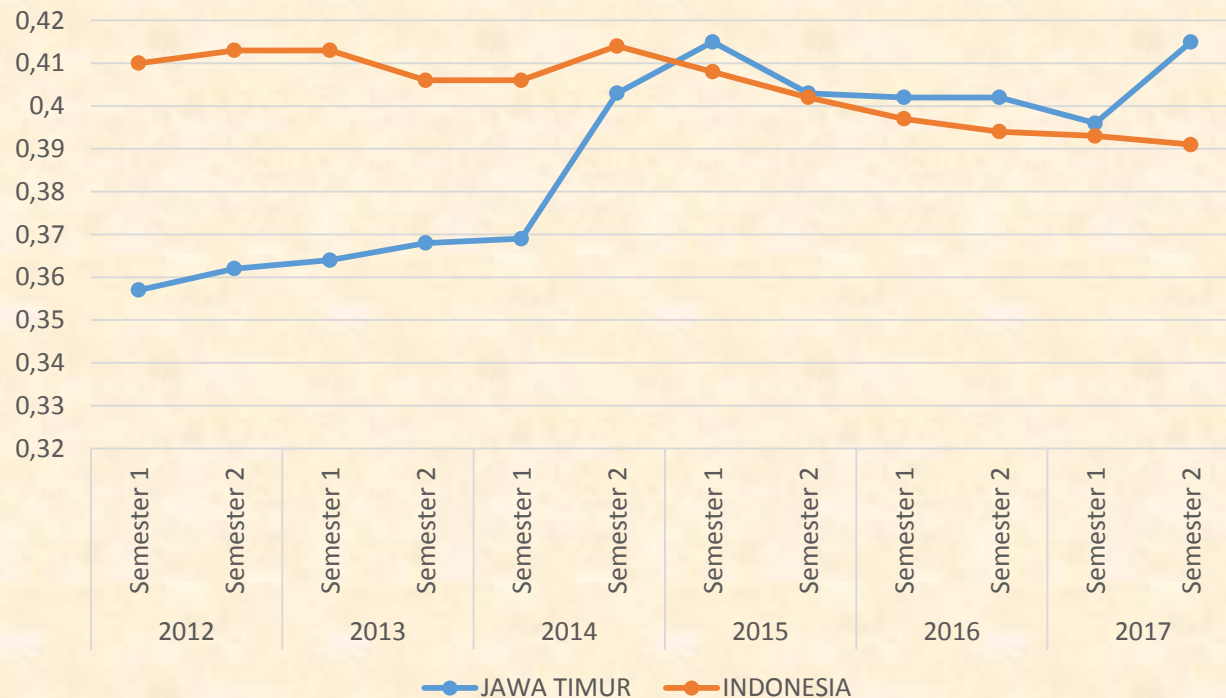
- IPM Prov. Jawa Timur pada Tahun 2016 sebesar 69,74 berada pada peringkat 15 dari 34 provinsi dan masih di bawah IPM Nasional.
- Dalam kurun 6 tahun (2010-2016) IPM Prov. Jawa Timur meningkat secara signifikan.
- Hal tersebut perlu ditingkatkan lagi sehingga kualitas hidup masyarakat Prov. Jawa Timur semakin meningkat.

Sumber: BPS, 2018



Gambaran Gini Rasio Provinsi Jawa Timur

Gini Rasio Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2017



Dalam kurun lima tahun terakhir, Gini Rasio Provinsi Jawa Timur berfluktuasi antara 0,3 – 0,5 yang menunjukkan tingkat ketimpangan menengah. Namun, pada tiga tahun terakhir berada di atas rata-rata Nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Prov. Jawa Timur harus dapat menurunkannya melalui pelaksanaan program-program penurunan angka kemiskinan, peningkatan konektivitas antar wilayah dan peningkatan kesempatan berusaha.



HASIL KORTEKRENBANG PROVINSI Jawa Timur TAHUN 2018 (2)

FORM 1A

- Usulan Proyek K/L yang mendukung Prioritas Nasional di Prov. Jawa Timur sebanyak 349 usulan, yang sudah dibahas/disepakati sebanyak 120 usulan

FORM 1B

- Usulan Daerah terhadap Proyek K/L yang mendukung Prioritas Nasional di Prov. Jawa Timur sebanyak 821 usulan, yang sudah dibahas/disepakati sebanyak 148 usulan

FORM 2

- Usulan program/kegiatan Prov. Jawa Timur yang mendukung Prioritas Nasional sebanyak 706 usulan, yang sudah disepekati sebanyak 28 usulan

FORM 3

- Usulan program/kegiatan kabupaten/kota di Prov. Jawa Timur yang mendukung Prioritas Nasional sebanyak 499 usulan, yang sudah dibahas/disepekati sebanyak 110 usulan

FORM 4B

- Usulan Daerah terhadap Proyek K/L yang mendukung pencapaian target pembangunan nasional (di luar Prioritas Nasional) sebanyak 248 usulan, yang sudah dibahas/disepekati sebanyak 9 usulan

FORM 5

- Kontribusi program/kegiatan provinsi yang mendukung pencapaian target pembangunan nasional (di luar Prioritas Nasional) sebanyak 103 usulan, yang sudah dibahas/disepekati sebanyak 2 usulan

FORM 6

- Kontribusi program/kegiatan kabupaten/kota yang mendukung pencapaian target pembangunan nasional (di luar Prioritas Nasional) sebanyak 175 usulan, yang sudah dibahas/disepekati sebanyak 11 usulan



Usulan program/kegiatan Provinsi Jawa Timur yang mendukung Prioritas Nasional dan telah disepakati sebanyak 28 usulan, terdiri dari urusan:

No.	Urusan	Jumlah Usulan yang Disetujui
1	Energi dan Sumber Daya Mineral	1
2	Kehutanan	3
3	Kelautan dan Perikanan	2
4	Kepemudaan dan Olahraga	1
5	Kesehatan	2
6	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1
7	Pariwisata	11
8	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1
9	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2
10	Penanaman Modal	2
11	Pendidikan	1
12	Perpustakaan	1
	TOTAL	28



ISU STRATEGIS YANG MENJADI PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

ISU STRATEGIS

1. Belum optimalnya kualitas pendidikan menengah, kualitas layanan dan penyediaan sarana prasarana kesehatan, produktivitas ketenagakerjaan, dan penanggulangan kemiskinan.
2. Minimnya konektivitas darat, laut dan udara untuk mendukung pembangunan ekonomi.
3. Rendahnya produktivitas pangan, nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan serta belum optimalnya pengelolaan pariwisata.
4. Belum optimalnya pengelolaan ketahanan energi dan sumber daya mineral, sumber daya air serta pelestarian sumber daya alam.
5. Rawan ketenteraman dan ketertiban dan penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkoba.

UPAYA PENYELESAIAN

1. Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan serta kesehatan.
2. Meningkatkan kualitas dan produktivitas ketenagakerjaan serta mempercepat penanggulangan kemiskinan.
3. Mengembangkan dan membangun infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Kualitas Produk pertanian, industri dan pariwisata.
5. Meningkatkan ketahanan energi dan tata kelola sumber daya.
6. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban terhadap isu potensi konflik.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Neraca Pendidikan Provinsi Jawa Timur



NERACA PENDIDIKAN DAERAH 2016



PROV. JAWA TIMUR

Sambutan

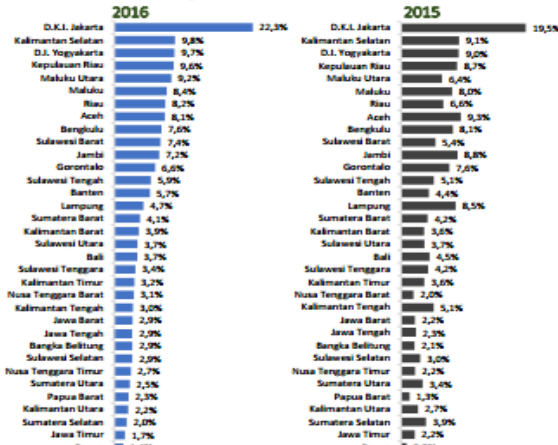
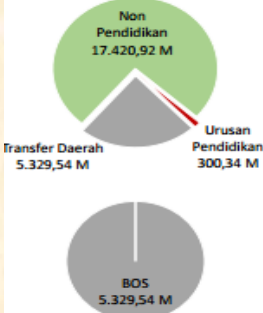
Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarokaatuh
Neraca Pendidikan Daerah (NPD) merupakan ikhtiar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan gambaran mutakhir tentang kondisi dan capaian pendidikan suatu Provinsi/Kabupaten/Kota. NPD 2016 ini diterbitkan dengan memperhatikan masukan daerah dan para pengguna, sehingga terdapat perubahan dalam beberapa komponen yang sebelumnya ditampilkan pada NPD 2015. Sebagai instrumen input dan output pendidikan, NPD dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan pendidikan, khususnya di daerah, sebagai acuan dalam menentukan prioritas pembangunan pendidikan. Lebih dari itu, masyarakat luas dapat memanfaatkan NPD sebagai alat untuk berkontribusi penuh dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan pendidikan demi mewujudkan pendidikan yang bermutu, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mari bersama kita majukan pendidikan Indonesia. Semoga ikhtiar ini memberikan kontribusi positif bagi masa depan anak didik kita. Amin.
Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarokaatuh

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Muhadjir Effendy

TOTAL APBD Rp23.050,8 M

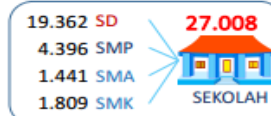
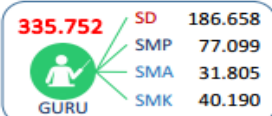
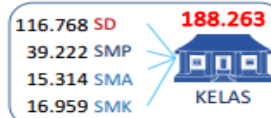
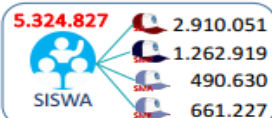
PERSENTASE ANGGARAN URUSAN PENDIDIKAN DALAM APBD (di luar Transfer Daerah)



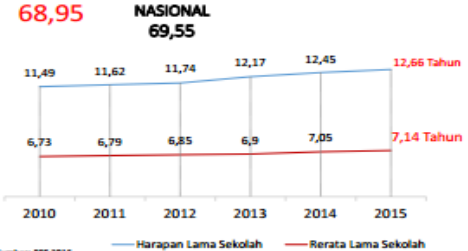
Setara dengan: **Rp56.400** per siswa per tahun

Sumber: Biro PKLN 2016

Data Pendidikan Daerah

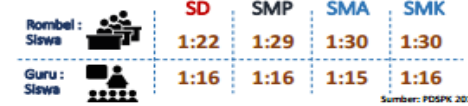


INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2015



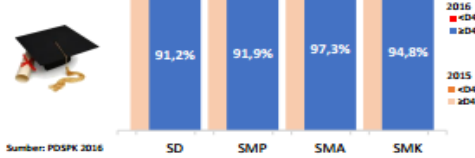
Sumber: BPS 2016

RASIO PENDIDIKAN



Sumber: POSPK 2016

KUALIFIKASI GURU



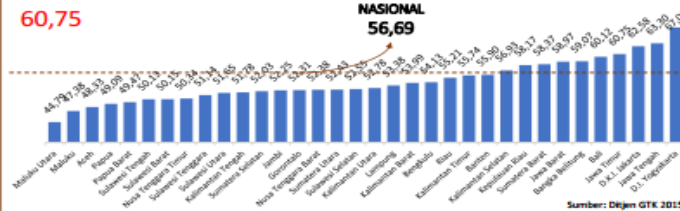
Sumber: POSPK 2016

UJI KOMPETENSI GURU PER JENJANG



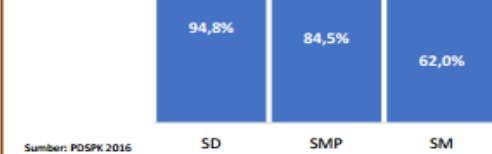
Sumber: Ditjen GTK 2015

UJI KOMPETENSI GURU



Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, Telepon 021-5711144
November 2016

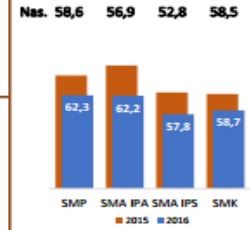
ANGKA PARTISIPASI MURNI



Sumber: POSPK 2016

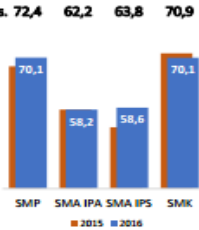


UJIAN NASIONAL

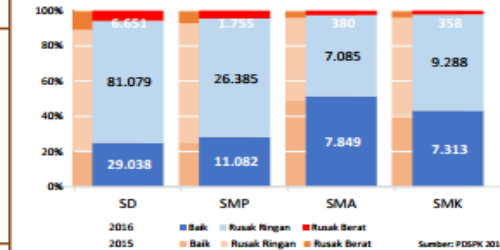


Sumber: Puspendik 2016

INDEKS INTEGRITAS UJIAN NASIONAL

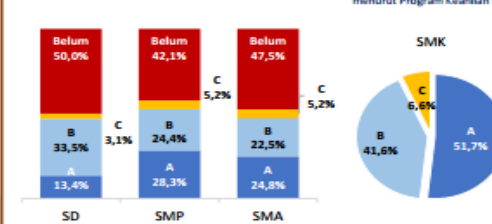


KONDISI RUANG KELAS

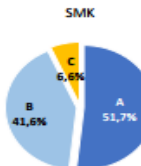


Sumber: POSPK 2016

AKREDITASI



Untuk SMK, hasil akreditasi menurut Program Keahlian



Sumber: BAN-SM 2016



100 KAB/KOTA UTAMA UNTUK INTERVENSI STUNTING

- | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1 KAB. ACEH TENGAH | 26 KAB. CIREBON | 51 KAB. BANGKALAN | 76 KAB. KETAPANG |
| 2 KAB. PIDIE | 27 KAB. SUMEDANG | 52 KAB. SAMPANG | 77 KAB. BARITO TIMUR |
| 3 KAB. LANGKAT | 28 KAB. INDRAMAYU | 53 KAB. PAMEKASAN | 78 KAB. HULU SUNGAI UTARA |
| 4 KAB. PADANG LAWAS | 29 KAB. SUBANG | 54 KAB. SUMENEP | 79 KAB. PENAJAM PASER UTARA |
| 5 KAB. NIAS UTARA | 30 KAB. KARAWANG | 55 KAB. PANDEGLANG | 80 KAB. MALINAU |
| 6 KOTA GUNUNGSITOLI | 31 KAB. BANDUNG BARAT | 56 KAB. GIANYAR | 81 KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 7 KAB. PASAMAN | 32 KAB. CILACAP | 57 KAB. LOMBOK BARAT | 82 KAB. BANGGAI |
| 8 KAB. PASAMAN BARAT | 33 KAB. BANYUMAS | 58 KAB. LOMBOK TENGAH | 83 KAB. ENREKANG |
| 9 KAB. ROKAN HULU | 34 KAB. PURBALINGGA | 59 KAB. LOMBOK TIMUR | 84 KAB. BUTON |
| 10 KAB. KERINCI | 35 KAB. ... | | 85 KAB. BOALEMO |
| 11 KAB. OGANKOMERING ILIR | 36 KAB. ... | | 86 KAB. GORONTALO |
| 12 KAB. K A U R | 37 KAB. ... | | 87 KAB. MAJENE |
| 13 KAB. LAMPUNG SELATAN | 38 KAB. ... | | 88 KAB. POLEWALI MANDAR |
| 14 KAB. LAMPUNG TIMUR | 39 KAB. ... | | 89 KAB. MAMUJU |
| 15 KAB. LAMPUNG TENGAH | 40 KAB. ... | | 90 KAB. MALUKU TENGAH |
| 16 KAB. BANGKA BARAT | 41 KAB. PEMALANG | | 91 KAB. SERAM BAGIAN BARAT |
| 17 KAB. NATUNA | 42 KAB. BREBES | | 92 KAB. HALMAHERA SELATAN |
| 18 KEPULAUAN SERIBU | 43 KAB. KULON PROGORO | | 93 KAB. SORONG SELATAN |
| 19 KAB. BOGOR | 44 KAB. TRENGGALEK | | 94 KAB. TAMBRAUW |
| 20 KAB. SUKABUMI | 45 KAB. MALANG | | 95 KAB. JAYAWIJAYA |
| 21 KAB. CIANJUR | 46 KAB. JEMBER | | 96 KAB. TOLIKARA |
| 22 KAB. BANDUNG | 47 KAB. BONDOWOSO | | 97 KAB. NDUGA |
| 23 KAB. GARUT | 48 KAB. PROBOLINGGO | | 98 KAB. LANNY JAYA |
| 24 KAB. TASIKMALAYA | 49 KAB. NGANJUK | | 99 KAB. DOGIYAI |
| 25 KAB. KUNINGAN | 50 KAB. LAMONGAN | | 100 KAB. INTAN JAYA |

Berdasarkan data Podes, 2014 (diolah) di Prov. Jawa Timur terdapat 447.965 balita mengalami *stunting*, yang tersebar di 11 kabupaten. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus.



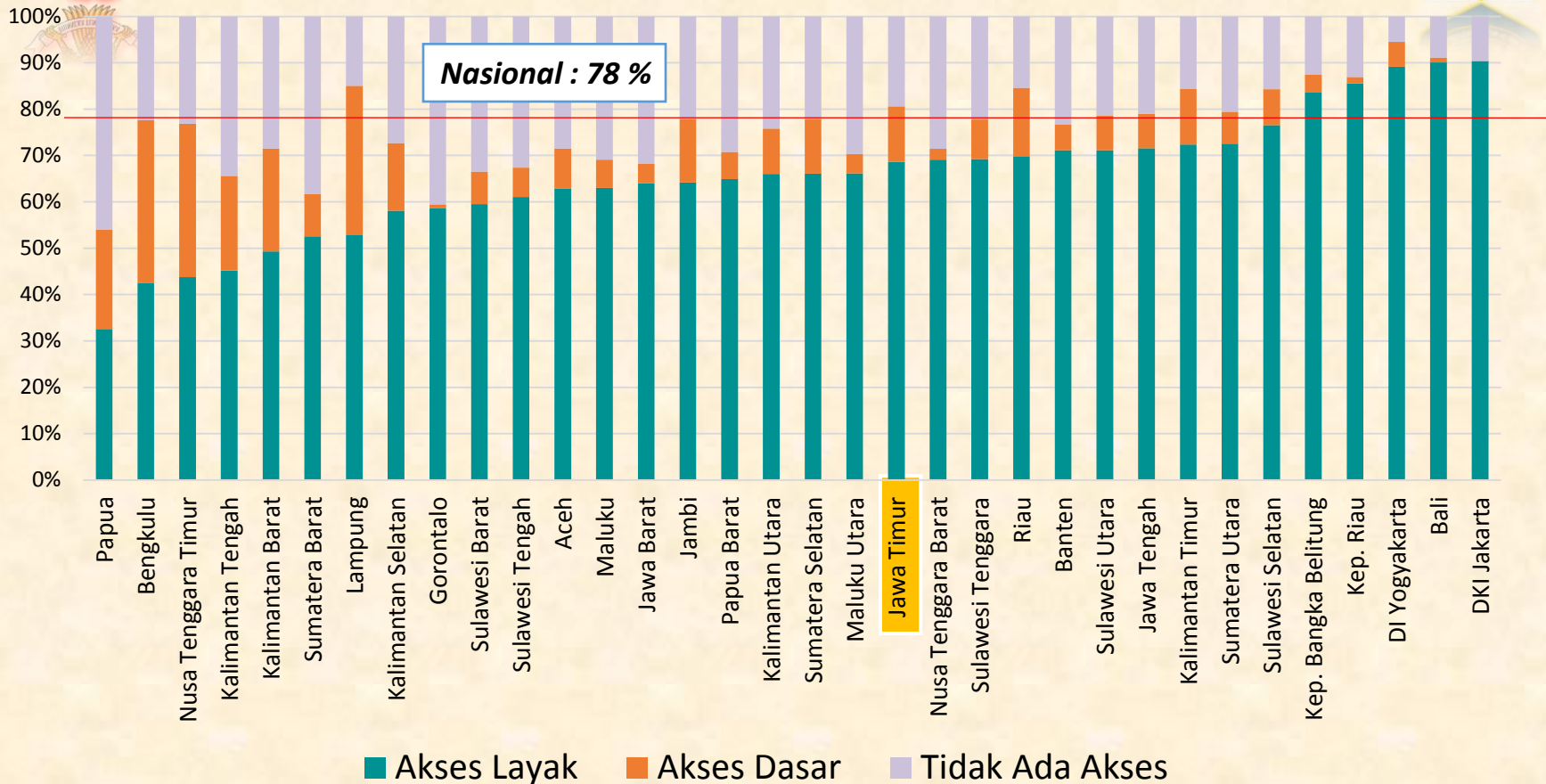
ALTERNATIF PROGRAM KERJA PEMERINTAH DAERAH TERKAIT PENURUNAN PREVALENSI STUNTING



- Sosialisasi/orientasi bagi pemangku kepentingan tentang gizi dalam rangka penurunan prevalensi *stunting*;
- Melakukan evaluasi RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota → *review* dan pendampingan penyusunan (baru);
- Sinkronisasi RKPD Tahun 2019 → *review* dan pendampingan penyusunan;
- Melakukan pendataan PUS, Bumil, Remaja Putri di 100 daerah intervensi *stunting* untuk mendapatkan NIK dan Akte Kelahiran;
- Melakukan pendampingan kepada Kabupaten/Kota untuk menyusun RAD dan pelaksanaannya dalam rangka penerapan SPM di Daerah
- Melakukan penyusunan kebijakan untuk integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran



CAPAIAN AKSES AIR BAKU DAN AIR LIMBAH PROVINSI (Berdasarkan Susenas 2017)



- Capaian akses masyarakat Prov. Jawa Timur terhadap air baku dan air limbah layak mencapai 68,60% dan masih di bawah rata-rata Nasional. Sedangkan sisanya mempunyai akses dasar sebesar 12,03% dan tidak ada akses sebesar 19,37%.
- Oleh karena itu, Pemerintah Prov. Jawa Timur masih perlu meningkatkan akses terhadap air baku dan air limbah melalui program-program peningkatan infrastruktur wilayah.



CAPAIAN BIDANG SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR



Rastra di Provinsi Jawa Timur dibagikan kepada 2.742.633 keluarga penerima manfaat (KPM) yang masing-masing mendapatkan 15 kg beras per bulan.

Tahun 2018 ini teralokasikan sebesar Rp. 16.202.560.000,00 untuk 147.296 Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Jawa Timur.





STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PP NO. 2 TAHUN 2018

- ❖ Amanat Pasal 18 UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah **memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.**
- ❖ Selanjutnya Pasal 298 menyebutkan bhw **Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar** yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR

PENDIDIKAN

KESEHATAN

PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG

PERUMAHAN
RAKYAT DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN

KETENTERAMAN,
KETERTIBAN
UMUM DAN
PELINDUNGAN
MASYARAKAT

SOSIAL

SEBAGIAN SUBSTANSInya merupakan KEBUTUHAN DASAR

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG:

PENDIDIKAN

KESEHATAN

PEKERJAAN
UMUM

PERUMAHAN
RAKYAT

KETENTERAMAN,
KETERTIBAN
UMUM DAN
PELINDUNGAN
MASYARAKAT

SOSIAL

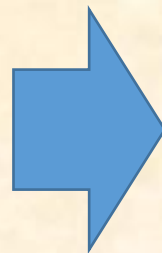
MATERI MUATAN SPM

Standar Pelayanan Minimal memuat **JENIS, MUTU, dan PENERIMA** Pelayanan Dasar.

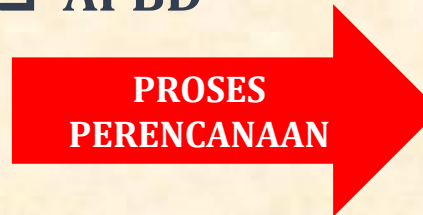
Setiap Jenis Pelayanan Dasar memiliki Mutu Pelayanan Dasar.



SPM PERLU DIINTEGRASIKAN KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH



- RPJMD
- RENSTRA
- RKPD 2019**
- RENJA
- APBD



Jenis, Mutu dan Penerima Pelayanan Dasar

1. Identifikasi penerima;
2. Identifikasi ketersediaan barang/jasa kebutuhan dasar;
3. Identifikasi pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar .

Materi Yang Diatur Dalam PP 2/2018 SPM



Integrasi ke dalam dokumen perencanaan (Program Pemenuhan SPM)

Diatur Permen Perencanaan



Integrasi ke dalam dokumen anggaran (Program Pemenuhan SPM)

Diatur PP/Permen Penganggaran

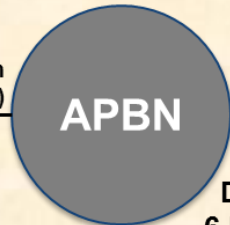


PEMERINTAH PUSAT

- DBH
- DAU
- DAK
- Dana Otsus
- Keistimewaan DIY
- Dana Penyesuaian
- Dana Transfer Lainnya

Mendanai Kegiatan Desentralisasi

POLA_HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH (UU 23/2014 dan UU 33/2004)



POKJA Bel. Transf. Daerah (MDN, Menkeu, Bappenas & Banggar)

POKJA Bel. Pusat (Menkeu, Bappenas, K/L, Banggar)

Mendanai Kegiatan Dekon/TP dan Instansi Vertikal

Belanja Untuk Daerah

1. Belanja Pusat di Pusat
2. Belanja Pusat Di Daerah

Di luar 6 Urusan

6 Urusan

PEMERINTAH DAERAH

PELIMPAHAN URUSAN DAN WEWENANG

- Tunj. Profesi Guru PNSD
- Tamb. Penghasilan Guru PNSD
- Bantuan Op. Sekolah
- DID
- Dana Proyek Pemda & Desen
- Dana Darurat

Desentralisasi

- Bel Langsung
 - B. Pegawai
 - B. Barang & jasa
 - B. Modal

- Bel Tdk Igsng
 - B. Pegawai
 - B. Bunga
 - B. Subsidi
 - B. Hibah
 - B. Bansos
 - B. Bagi Hasil
 - B. Bankeu
 - BTT



- Pembiayaan Lainnya
- Pinjaman (termasuk Obligasi Daerah)
- Penggunaan SILPA

- PDRD
- Hsl Pengel Kekayaan Drh yg di pisahkan
- Lain2 PAD yg sah

- PAD
- DAPER
- Lain-Lain Pend. yang sah

Pendapatan Daerah

Belanja Daerah

Surplus / Defisit Daerah

Pembiayaan Daerah

1

2

APBD

3

4



KEWAJIBAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah meliputi:

Pasal
280

1

Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

2

Mensinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah

3

Melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pem yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.



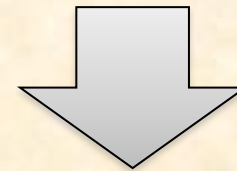
KEUANGAN DAERAH



semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

AZAZ UMUM APBD

1. Disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah
2. **Berpedoman pada RKPD** dalam rangka Mewujudkan Pelayanan Kepada Masyarakat
3. Mempunyai fungsi Otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi
4. Ditetapkan dengan PERDA (psl 15 PMDN 13/06)



APBD





Prinsip "Money Follows Program"





KEUANGAN DAERAH

- Penggunaan APBD harus lebih **fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif** dan **memiliki manfaat** untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- Pemda **Menetapkan target capaian kinerja setiap belanja**, baik dalam konteks daerah, SKPD, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- Program dan kegiatan harus **memberikan informasi yang jelas dan terukur** serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek **indikator, tolak ukur dan target kinerjanya**.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Belanja Daerah

Urusan Pemerintahan
Konkuren yang
menjadi kewenangan
daerah



Pelaksanaan
Tugas
Organisasi

Target Capaian Prioritas
Pembangunan Nasional
Tahun 2018 sesuai
kewenangan

urusan
pemerintah
wajib
terkait
pelayanan
dasar

urusan
pemerintah
wajib
yg tdk
terkait
pelayanan
dasar

urusan
pemerintah
pilihan

Fokus terhadap
kegiatan yang
berorientasi
produktif dan
memiliki manfaat
untuk meningkatkan
kualitas SDM,
pelayanan publik
dan pertumbuhan
ekonomi daerah

ditetapkan
dengan
SPM

Analisis
standar
belanja

Standar
harga
satuan
regiona
l





KEMENTERIAN DALAM NEGERI



GAMBARAN UMUM APBD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PENETAPAN PERDA APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018

NO	DAERAH	2014	2015	2016	2017	2018
	Prov. Jawa Timur	09 Desember 2013	17 Desember 2014	15 Desember 2015	23 Desember 2016	13 Desember 2017
1	Kab. Bangkalan	27 Desember 2013	24 Desember 2014	28 Desember 2015	09 Februari 2017	29 Desember 2017
2	Kab. Banyuwangi	31 Desember 2013	23 Desember 2014	03 November 2015	21 Desember 2016	29 Desember 2017
3	Kab. Blitar	09 Januari 2014	29 Desember 2014	29 Desember 2015	30 Desember 2016	28 Desember 2017
4	Kab. Bojonegoro	09 Januari 2014	24 Desember 2014	16 Desember 2015	30 Desember 2016	29 Desember 2017
5	Kab. Bondowoso	20 Desember 2013	18 Desember 2014	21 Januari 2016	09 Desember 2016	15 Desember 2017
6	Kab. Gresik	20 Desember 2013	30 Desember 2014	30 Desember 2015	30 Desember 2016	29 Desember 2017
7	Kab. Jember	17 Desember 2013	18 Desember 2014	23 Desember 2015	30 Januari 2017	Belum Terinformasi
8	Kab. Jombang	24 Desember 2013	16 Desember 2014	23 Desember 2015	28 Desember 2016	28 Desember 2017
9	Kab. Kediri	07 Januari 2014	15 Desember 2014	16 Desember 2015	23 Desember 2016	27 Desember 2017
10	Kab. Lamongan	31 Desember 2013	19 Desember 2014	21 Desember 2015	14 Desember 2016	14 Desember 2017
11	Kab. Lumajang	30 Desember 2013	30 Desember 2014	29 Desember 2015	20 Desember 2016	29 Desember 2017
12	Kab. Madiun	30 Desember 2013	23 Desember 2014	28 Desember 2015	29 Desember 2016	29 Desember 2017
13	Kab. Magetan	27 Desember 2013	17 Desember 2014	22 Desember 2015	27 Desember 2016	28 Desember 2017
14	Kab. Malang	27 Desember 2013	30 Desember 2014	09 November 2015	30 Desember 2016	29 Desember 2017
15	Kab. Nganjuk	18 Februari 2014	30 Desember 2014	05 Januari 2016	29 Desember 2016	28 Desember 2017
16	Kab. Ngawi	11 Desember 2013	18 Desember 2014	18 Desember 2015	29 Desember 2016	22 Desember 2017
17	Kab. Pacitan	17 Desember 2013	12 Desember 2014	03 Desember 2015	09 Desember 2016	13 Desember 2017
18	Kab. Pamekasan	30 Desember 2013	30 Desember 2014	29 Desember 2015	29 Desember 2016	29 Desember 2017

Keterangan:

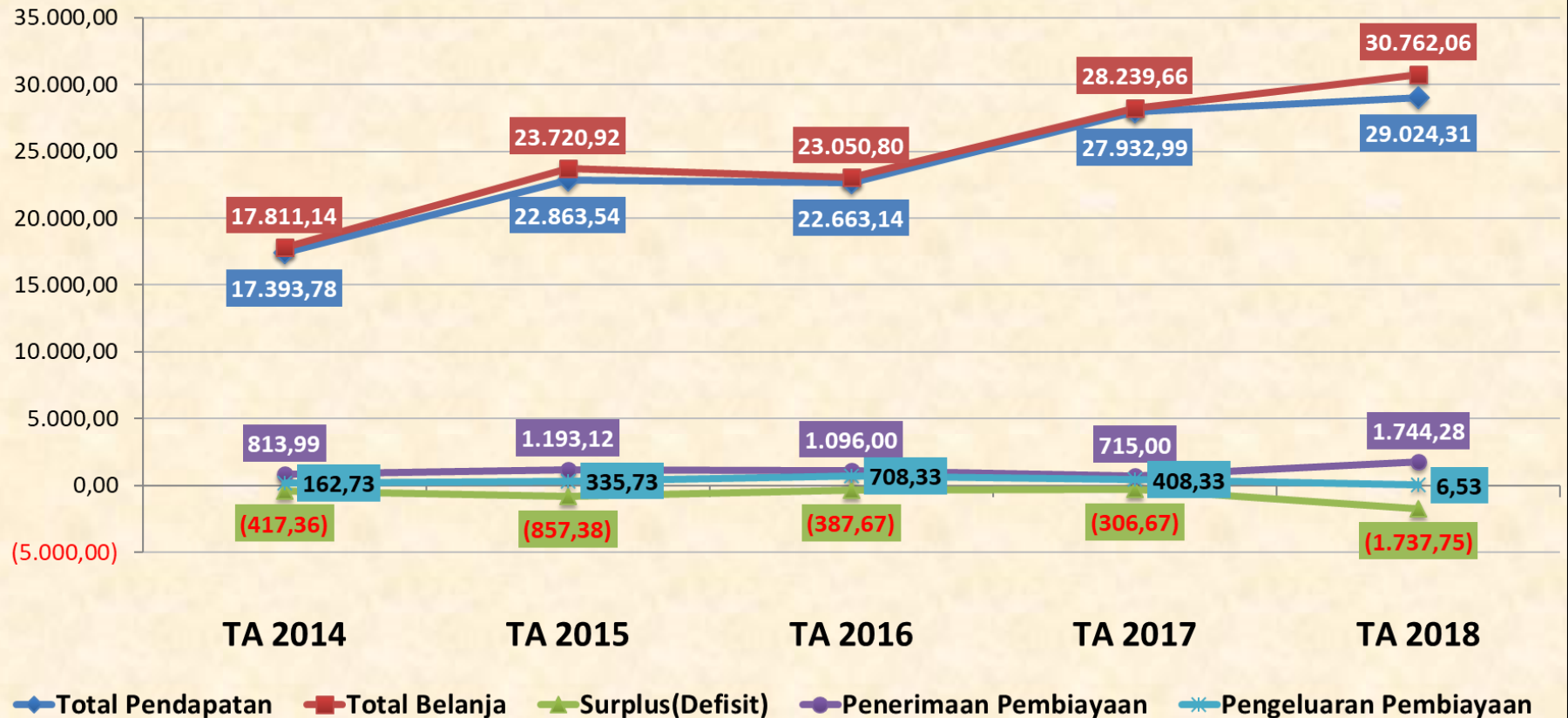
- Tepat Waktu (sebelum 31 desember)
- Tidak Tepat Waktu (setelah 31 desember)

Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2018



GAMBARAN UMUM APBD PROVINSI JAWA TIMUR TA 2014-2018

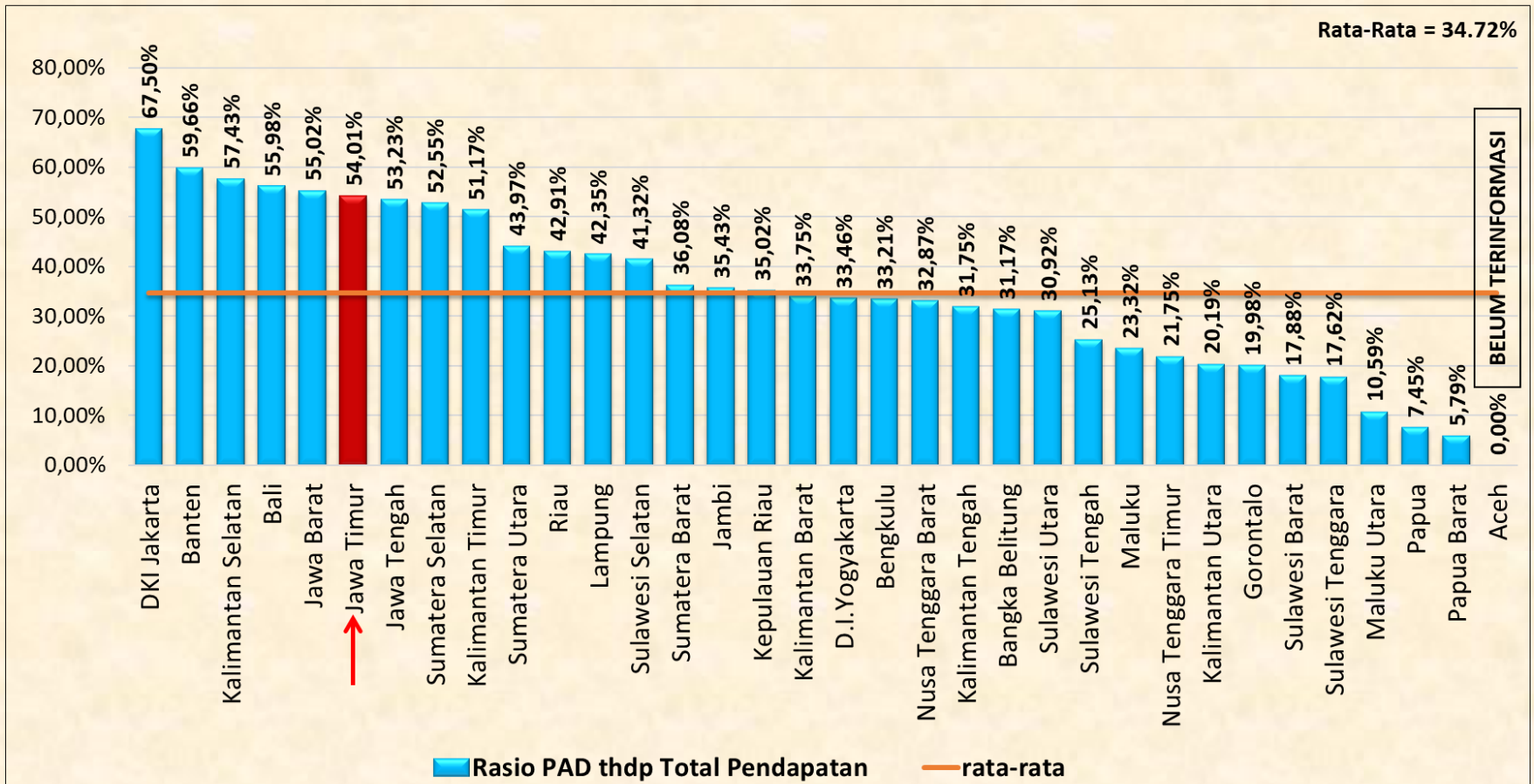
miliar rupiah



Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2018



DERAJAT OTONOMI FISKAL PROVINSI SE-INDONESIA (PROPORSI PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN TA 2018)



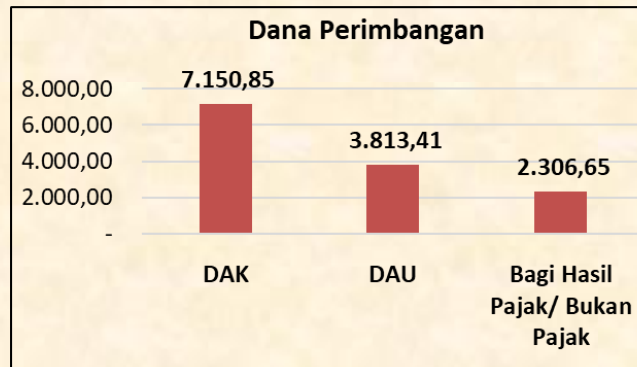
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2018

Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Prov. Jawa Timur sebesar 54,01% lebih tinggi daripada rata-rata Nasional sebesar 34,72%.

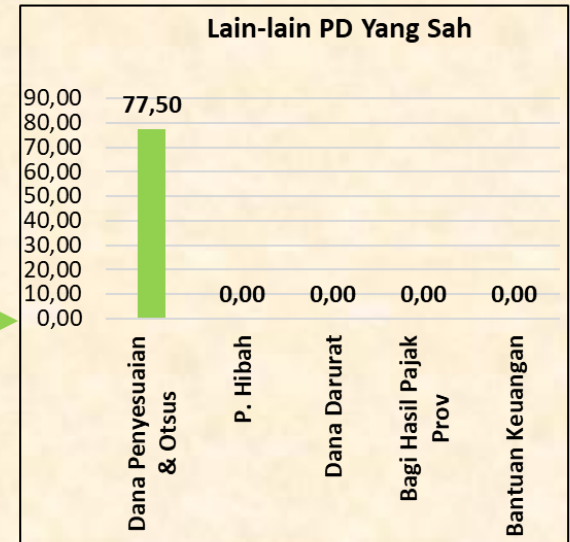
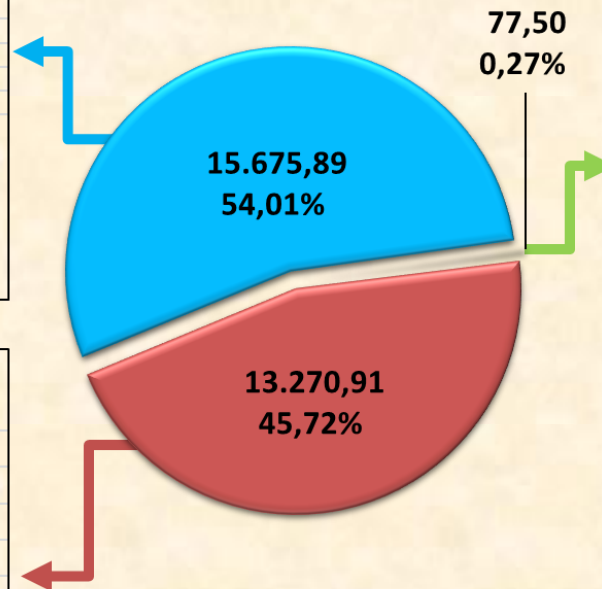


PENDAPATAN APBD PROVINSI JAWA TIMUR TA 2018

miliar rupiah



Total Pendapatan: 29,024.31



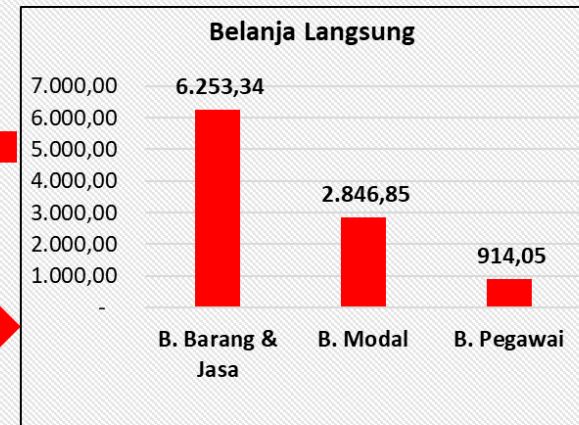
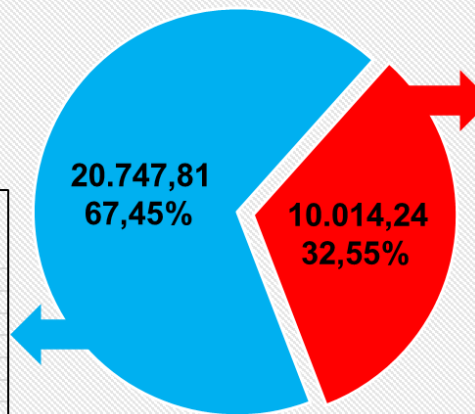
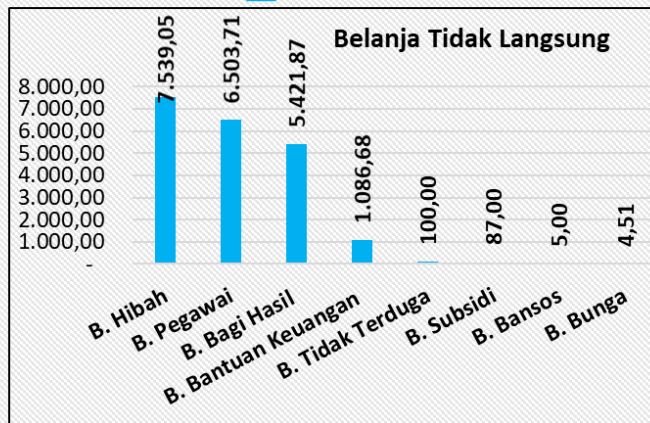
- Dana Perimbangan
- PAD
- Lain-Lain PD Yang Sah



BELANJA APBD PROVINSI JAWA TIMUR TA 2018

miliar rupiah

Total Belanja: 30,762.06



- Belanja Tidak Langsung
- Belanja Langsung

Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2018

Proporsi belanja tidak langsung (belanja pegawai dan hibah) masih dominan (67,45%) apabila dibandingkan dengan belanja Langsung



**LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN OLEH PEMDA
ANTARA LAIN:**

1. Efisiensi belanja daerah dan meningkatkan pendapatan daerah
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi dan sumber-sumber pendapatan asli daerah
3. Mengoptimalkan belanja pegawai yang bersumber dari Belanja Tidak Langsung
4. Mengurangi Belanja Pegawai dan meningkatkan Belanja Publik
5. Mengurangi Sisa Lebih Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) dan mendorong dana SiLPA dimanfaatkan untuk penyertaan modal
6. Melakukan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam pengendalian inflasi daerah
7. Kepatuhan daerah terkait penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran



HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (1)

Mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara/daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Peringkat	Nilai
AA	>90-100
A	>80-90
BB	>70-80
B	>60-70
CC	>50-60
C	>30-50
D	0-30

Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk:

- 1. Merencanakan kinerja dan target kinerja,*
- 2. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan,*
- 3. Menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan,*
- 4. Serta telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.*



HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (2)

Provinsi	2016	2017
Jawa Timur	A	A
Bali	BB	BB
DI Yogyakarta	A	A
Jawa Barat	A	A
Banten	CC	CC
DKI Jakarta	B	B
Jawa Tengah	BB	BB

Berdasarkan data di atas, hasil evaluasi Provinsi Jawa Timur adalah A. Meskipun telah menunjukkan kinerja yang baik, Pemerintah Prov. Jawa Timur tetap harus mempertahankan akuntabilitasnya dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis.



Pengembangan Smart City "Kota Cerdas"



1. Kab. Banyuwangi
2. Kab. Bojonegoro
3. Kab. Gresik
4. Kab. Sidoarjo



SEBAGAI PENGENDALI (BUFFER) ARUS URBANISASI DAN DIARAHKAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN UTAMA YANG MENDORONG KETERKAITAN KOTA DAN DESA DI WILAYAH SEKITARNYA



MENGEMBANGKAN SISTIM TRANSPORTASI



MENINGKATKAN SARANA PEREKONOMIAN



MENINGKATKAN KEAMANAN KOTA



MENINGKATKAN PELAYANAN



MENINGKATKAN SARANA PERMUKIMAN



PENYEDIAAN SARANA PRASARANA





Pendanaan Desa dan Kemiskinan



DANA DESA

- Periode 2015-2017, Dana yang ke Desa mencapai Rp287,44 T
- Tahun 2018 Anggaran ke desa Rp107,46T



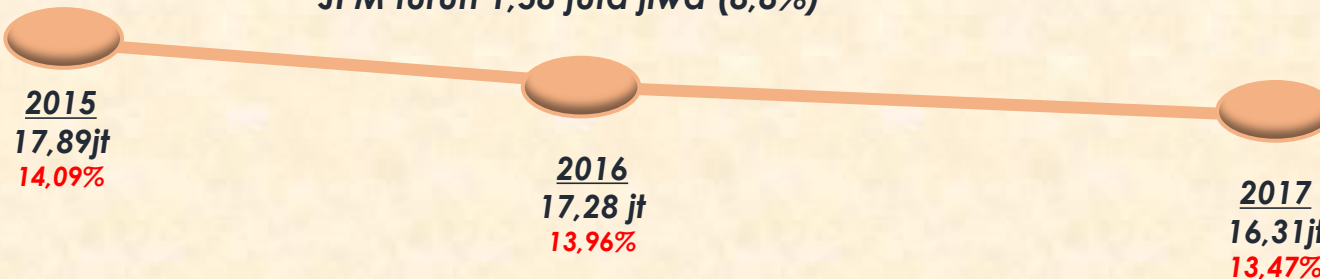
*Dana Desa Provinsi
Jawa Timur Thn.
2018*



Rp. 6.343.698.189.000,-

Penurunan Jumlah Penduduk Miskin (JPM) Perdesaan

JPM turun 1,58 juta jiwa (8,8%)




Pemanfaatan Dana Desa melalui skema Cash for Work dapat menjadi solusi untuk mempercepat : penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat, sekaligus menaikkan permintaan agregat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan kesenjangan antardesa





PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK INFRASTRUKTUR PUBLIK TA 2015-2018

KINERJA PENGGUNAAN 2015


 Pembangunan Rp14,21 T (82,21%)


 Pemberdayaan Masyarakat Rp1,37 T (7,7%)


 Penyelenggaraan Pemerintahan Rp1,13 T (6,55%)


 Pembinaan Kemasyarakatan Rp0,61 T (3,51%)

KINERJA PENGGUNAAN 2016

 Pembangunan Rp40,54 T (87,7%)

 Pemberdayaan Masyarakat Rp3,17 T (6,8%)

 Penyelenggaraan Pemerintahan Rp1,68 T (3,6%)

 Pembinaan Kemasyarakatan Rp0,84 T (1,8%)

Anggaran Infrastruktur Publik melalui Dana Desa

(triliun rupiah)

KOMPONEN	2015	2016	2017	2018
	APBN	APBN	APBN	APBN
Pagu Dana Desa	20,77	46,98	60,00	60,00
Anggaran Infrastruktur Publik melalui Dana Desa	17,07	41,20	52,62	52,62
%	82,20%	87,70%	87,70%	87,70%

ASUMSI :

- Tahun 2015-2016 berdasarkan laporan kinerja penggunaan Dana Desa
- Tahun 2017-2018 berdasarkan laporan kinerja penggunaan Dana Desa tahun 2016

Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa 2017 berdasarkan Laporan Pelaksanaan

Laporan Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2017 (34,93 Trilyun)

Sebanyak 75,77% Dana Desa Tahun 2017 masih didominasi untuk mendukung pembangunan sarana prasarana desa



No	Bidang	Anggaran	(%)
1	Pemenuhan Kebutuhan Dasar	2.663.508.353.886	7,62%
2	Sarana Prasarana Desa	26.468.132.944.629	75,77%
3	Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal	1.152.815.134.877	3,30%
4	Pemanfaatan SDA dan Lingk. Berkelanjutan	166.180.880.132	0,48%
5	Pemberdayaan Masyarakat	3.258.589.305.250	9,33%
6	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	728.931.606.725	2,09%
7	Pembinaan Kemasyarakatan	496.330.108.746	1,42%
TOTAL		34.934.488.334.245	100,00%

Sumber dari web: sipede.ppmk.kemendes.go.id Rekap 28 Desember 2017



PADAT KARYA TUNAI DESA

ARAHAN PRESIDEN JOKOWI

- **PADAT KARYA TUNAI DILAKSANAKAN DENGAN PRINSIP SWAKELOLA**
- **DITUJUKAN MENINGKATKAN DAYA BELI MASYARAKAT DESA YANG SECARA EKONOMI MASUK DALAM KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN**



SKB 4 MENTERI

**NOMOR: 140-8698 TAHUN 2017;
954/KMK.07/2017; 116 TAHUN 2017;
01/SKB/M.PPN/12/2017 TENTANG
PENYELARASAN DAN PENGUATAN
KEBIJAKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**



PERAN KEMENDAGRI

Melakukan pembinaan dan pengawasan bagi Pemerintah Daerah dan Desa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Desa terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintahan Desa, antara lain:

- Penguatan kapasitas Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- Penguatan peran kecamatan dan organisasi perangkat daerah dalam mendampingi Desa menyusun RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa.
- Mendorong Gubernur dan Bupati/Walikota dalam mengawal pelaksanaan Program Padat Karya Tunai.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINDUK (GISA)



GISA: SADAR tentang “APA”

- 1.Sadar pentingnya dokumen kependudukan
- 2.Sadar pentingnya data kependudukan yang benar
- 3.Sadar pemanfaatan data kependudukan

GISA: “SIAPA” yang harus **SADAR**

- 1.Sadar masyarakatnya,
- 2.Sadar petugasnya,
- 3.Sadar lembaga pengguna data

GISA: “TINGKATAN” gerakan **SADAR**

- 1.Desas/Kel Sadar Adminduk
- 2.Kecamatan Sadar Adminduk
- 3.Kabupaten/Kota Sadar Adminduk
- 4.Provinsi Sadar Adminduk
- 5.Indonesia Sadar Adminduk



Instruksi Menteri Dalam Negeri RI

Nomor : 470/837/SJ Tgl. 7 Februari 2018

1

MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH SESUAI TUPOKSI DAN KEWENANGAN UNTUK MELAKSANAKAN GISA

2

MENCIPTAKAN EKOSISTEM YANG MENDUKUNG SUKSESNYA GISA

3

MEMPEDOMANI PROGRAM GISA: (a) Program Sadar Kepemilikan Dokumen Kependudukan; (b) Program Sadar Pemutakhiran Data Penduduk; (c) Program Sadar Pemanfaatan Data Kependudukan; (d) Program Sadar Melayani Admuduk menuju Masyarakat yang bahagia

4

MENETAPKAN SETIAP PROV DIBENTUK MIN. 1 (SATU) KAB/KOTA SADAR ADMINDUK

5

MENETAPKAN SETIAP KEC. DALAM 1 (SATU) KAB/KOTA DIBENTUK MIN. 1 (SATU) DESA SADAR ADMINDUK



PENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)



DAYA SAING INDONESIA DALAM PERSAINGAN GLOBAL (TAHUN 2017-2018)

Diukur dari Kelembagaan, Infrastruktur, Lingkungan Makro Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan Dasar

PERINGKAT DAYA SAING INDONESIA DIANTARA NEGARA-NEGARA ASEAN TAHUN 2017-2018

NO	NEGARA	PERINGKAT DAYA SAING DARI 137 NEGARA	
		RANKING	SCORE
1	SINGAPURA	3	5,7
2	MALAYSIA	23	5,2
3	THAILAND	32	4,7
4	INDONESIA	36	4,7
5	BRUNAI DARUSSALAM	46	4,5
6	VIETNAM	55	4,4
7	PHILIPINA	56	4,4
8	KAMBOJA	94	3,9
9	LAOS	98	3,9
10	TIMOR LESTE	-	
11	MYANMAR	-	

sumber : *The Gobar Competitiveness Report 2017-2018, World Economi Forum* diolah

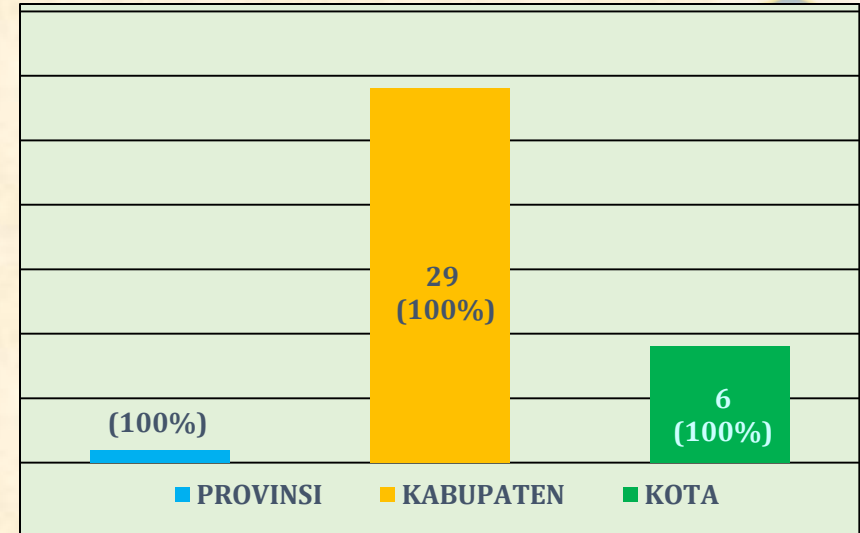
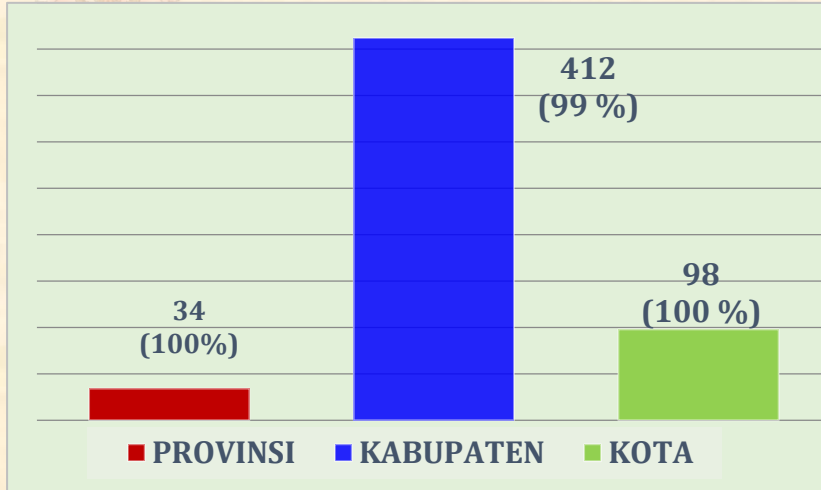


HASIL EVALUASI PTSP S.D. TAHUN 2017

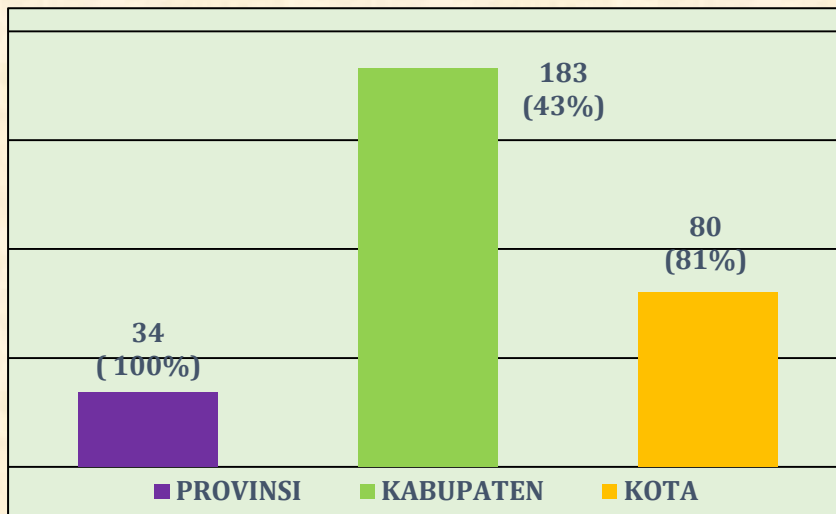


PTSP PROVINSI Jawa Timur

PROPORSI 544 DAERAH YANG SUDAH MEMBENTUK PTSP



DARI 544 PTSP YG TELAH MENETAPKAN SOP



HAMBATAN

- Belum optimalnya pelayanan dalam menetapkan dan melaksanakan sepenuhnya SOP PTSP. sehingga belum ada kepastian waktu penyelesaian dan biaya perizinan dan non perizinan.

TINDAK LANJUT

- Limpahkan sepenuhnya proses & penetapan perizinan dan non perizinan serta SOP PTSP
- Tingkatkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah melalui pembinaan dan pengawasan PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAI BASIS DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 274 UU 23 Tahun 2014

Perencanaan pembangunan Daerah **didasarkan** pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah

Pasal 391 UU 23 Tahun 2014

Pemda wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (informasi pembangunan dan keuangan Daerah) yang dikelola dalam suatu sistem informasi

Pasal 394 UU 23 Tahun 2014

Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi pembangunan Daerah dikenai sanksi

SIPD menjadi satu kesatuan dalam proses penyusunan dokrenda



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REKAP KETERISIAN SIPD DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	KETERISIAN DATA	NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	KETERISIAN DATA	NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	KETERISIAN DATA
1	PROVINSI JAWA TIMUR	12%	14	KAB. PROBOLINGGO	0%	27	KAB. BANGKALAN	8%
2	KAB. PACITAN	56%	15	KAB. PASURUAN	0%	28	KAB. SAMPANG	0%
3	KAB. PONOROGO	17%	16	KAB. SIDOARJO	1%	29	KAB. PAMEKASAN	2%
4	KAB. TRENGGALEK	100%	17	KAB. MOJOKERTO	0%	30	KAB. SUMENEP	0%
5	KAB. TULUNGAGUNG	0%	18	KAB. JOMBANG	0%	31	KOTA KEDIRI	0%
6	KAB. BLITAR	0%	19	KAB. NGANJUK	3%	32	KOTA BLITAR	100%
7	KAB. KEDIRI	25%	20	KAB. MADIUN	1%	33	KOTA MALANG	13%
8	KAB. MALANG	0%	21	KAB. MAGETAN	0%	34	KOTA PROBOLINGGO	43%
9	KAB. LUMAJANG	17%	22	KAB. NGAWI	9%	35	KOTA PASURUAN	0%
10	KAB. JEMBER	5%	23	KAB. BOJONEGORO	83%	36	KOTA MOJOKERTO	8%
11	KAB. BANYUWANGI	100%	24	KAB. TUBAN	0%	37	KOTA MADIUN	0%
12	KAB. BONDOWOSO	0%	25	KAB. LAMONGAN	0%	38	KOTA SURABAYA	0%
13	KAB. SITUBONDO	100%	26	KAB. GRESIK	100%	39	KOTA BATU	0%

Berdasarkan data di atas, Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih perlu memperkuat komitmen dan dukungan dalam menggunakan SIPD sebagai dasar perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah



KESIAPAN PELAKSANAAN PEMILU 2019



1. Pemerintah telah menyediakan DP4
2. Jumlah Pemilih per-TPS paling banyak 500 orang
3. Pemilih, TPS dan Logistik
4. Daftar Pemilih Berkelanjutan
5. Pengadaan Logistik
6. Percetakan dan Distribusi Logistik
7. Peran Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam Kampanye
8. Hitung dan Rekap Suara
9. Netralitas Pegawai Negeri Sipil
10. Bentuk Bantuan Dan Fasilitas





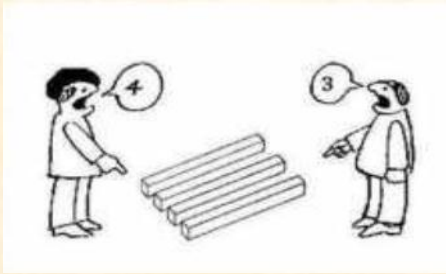
SUKSESKAN PEMILUKADA DI JAWA TIMUR

1. Provinsi Jawa Timur;
2. Kabupaten Lumajang
3. Kabupaten Bondowoso
4. Kabupaten Probolinggo
5. Kota Probolinggo
6. Kabupaten Pasuruan
7. Kota Malang
8. Kabupaten Nganjuk
9. Kabupaten Jombang
10. Kota Kediri
11. Kota Madiun
12. Kabupaten Madiun
13. Kabupaten Magetan
14. Kabupaten Tulungagung
15. Kota Mojokerto
16. Kabupaten Bojonegoro
17. Kabupaten Bangkalan
18. Kabupaten Sampang
19. Kabupaten Pamekasan





POTENSI KERAWANAN PELAKSANAAN PILKADA DAN PEMILU



Multi tafsir atas undang-undang



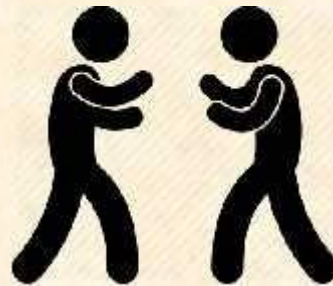
Konflik internal parpol



Daftar pemilih tetap (DPT)



Sabotase logistik pilkada



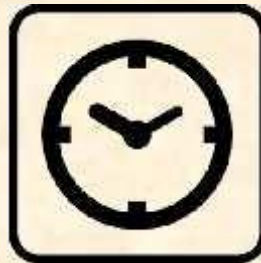
Bentrokan antar massa pendukung paslon



Praktek politik uang



Teror/ancaman/intimidasi



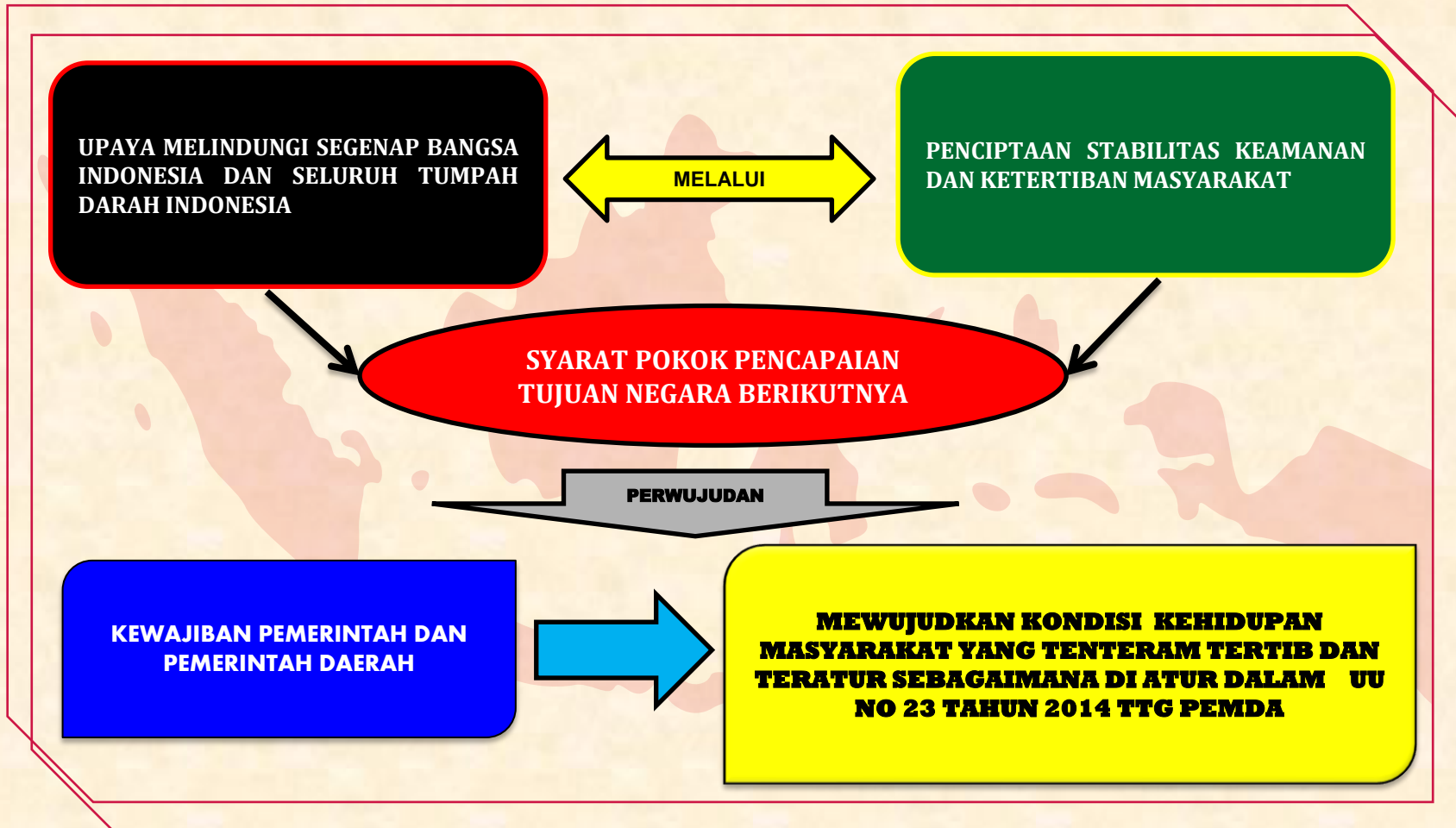
Mengulur waktu penghitungan suara



Penetapan pemenang dan hasil putusan mahkamah konstitusi



STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT





FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

**UNTUK MENUNJANG KELANCARAN
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM (PASAL 26)**

FORKOPIMDA PROVINSI

FORKOPIMDA KAB/KOTA

FORKOPIM DI KECAMATAN

- ❑ FORKOPIMDA PROV DIKETUAI OLEH GUBERNUR, FORKOPIMDA KAB/KOTA DIKETUAI OLEH BUPATI/WALI KOTA , DAN FORKOPIM DI KECAMATAN DIKETUAI OLEH CAMAT.
- ❑ ANGGOTA FORKOPIMDA PROV DAN FORKOPIMDA KAB/KOTA TERDIRI ATAS PIMPINAN DPRD, PIMPINAN KEPOLISIAN, PIMPINAN KEJAKSAAN, DAN **PIMPINAN SATUAN TERITORIAL TENTARA NASIONAL INDONESIA DI DAERAH.**
- ❑ ANGGOTA FORKOPIM DI KECAMATAN TERDIRI ATAS PIMPINAN KEPOLISIAN DAN **PIMPINAN KEWILAYAHAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DI KECAMATAN.**
- ❑ TERKAIT KELEMBAGAAN FORKOPIMDA DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN, **DIATUR LEBIH LANJUT DLM PERATURAN PEMERINTAH.**



AREA RAWAN KORUPSI



392 kepala daerah tersangkut kasus hukum, korupsi dengan jumlah terbesar 313 kasus.

LHKPN : 41 % wajib lapor LHKPN tidak pernah lapor.

Indeks Persepsi Korupsi : 90 dari 176 Negara

78 KDH sejak 2004 s.d sekarang tersangkut korupsi di KPK, modus terbesar adalah penyuapan & pengadaan barang/jasa.





HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2019



1. Arah Kebijakan Nasional

- 1) Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4-5,8 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,5 – 4,5 persen.
- 2) Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,5 persen; IPM menjadi 71,98; gini rasio pada kisaran 0,38-0,39 pada tahun 2019; dan Tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen.
- 3) Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 21,68 persen, Jawa 58,18 persen, Kalimantan 8,23 persen, Sulawesi 6,26 persen, Bali-Nusa Tenggara 3,18 persen, Maluku 0,54 persen Papua 1,94 persen.

2. Prioritas Nasional (PN)

- 1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
- 2) Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
- 3) Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
- 4) Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan
- 5) Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

3. Program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan daerah

4. Memprioritaskan belanja daerah terhadap urusan wajib pelayanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM): pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan dan kawasan permukiman; trantibum & linmas; dan sosial



TERIMA KASIH⁵³